

Pengembangan Agribisnis Pedesaan Model Kluster Industri Pertanian Dengan Pola Kemitraan

Sukrianto¹

¹Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan Cirendeui, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

sukrianto@umj.ac.id

Abstrak

Dalam rangka strategi industrialisasi yang dimulai dari sektor pertanian, penulis menyajikan tulisan dengan tema: “Pengembangan Agribisnis Pedesaan Model Kluster Industri Pertanian Dengan Pola Kemitraan”. Pola Kemitraan merupakan suatu cara yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, masyarakat desa dan bangsa Indonesia pada umumnya. Tulisan ini ditujukan untuk sumbangan pemikiran terkait persoalan Pertanian dan Kebijakan Pertanian khususnya di Indonesia. Berpijak dari realitas yang ada pada Kebijakan Pembangunan Pedesaan, khususnya sektor pertanian dan dimaksudkan sebagai saran alternatif konsep yang bersifat membangun kerangka kebijakan pertanian.

Pengembangan agribisnis terpadu secara utuh dapat digambarkan sebagai sebuah sistem mekanik dimana keterkaitan antar satu subsistem dengan subsistem lainnya sangat erat dan penting, sehingga gangguan pada salah satu subsistem dapat menyebabkan keseluruhan sistem itu terganggu. Model kluster industri pertanian dengan pola kemitraan dapat menjadi sebuah unit sel dari agribisnis terpadu. Keberadaan dan peranan lembaga-lembaga penunjang (seperti bank, koperasi, peraturan pemerintah, angkutan, pasar dan lainnya) merupakan bagian penting dalam agribisnis. Demikian pula mengenai pelaku setiap subsistem dan teknologi yang digunakan.

Kata Kunci: Agribisnis Pedesaan, Kemitraan, Model Kluster.

Latar Belakang

Yusuf dan Widyastutik, 2007. dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Analisis pengaruh ekspor-impor komoditas pangan utama dan liberalisasi perdagangan terhadap neraca perdagangan Indonesia” diantaranya menyimpulkan bahwa : Liberalisasi perdagangan komoditas pangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap neraca perdagangan non-migas Indonesia. Dengan ini, mereka menyarankan agar pemerintah beserta komponen bangsa harus berupaya meningkatkan produksi pangan dalam negeri, sebab upaya mempertahankan nilai neraca perdagangan non-migas Indonesia agar tetap positif tidak hanya dengan menaikkan ekspor pangan semata. Selama ini, ekspor komoditas

pangan Indonesia yang lebih didominasi ekspor pangan olahan ditunjang bahan baku impor, sehingga upaya memperbesar ekspor justru membuat penurunan pada neraca perdagangan non-migas Indonesia. Mereka juga menyarankan peningkatan produksi pangan dan diversifikasi makanan bagi masyarakat Indonesia perlu digalakkan lebih lanjut agar laju impor pangan yang berdampak negative pada neraca perdagangan non-migas Indonesia dapat ditekan.

Di Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru para pembuat kebijakan dan perencana pembangunan ekonomi di Jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusatkan hanya di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, dan hanya sektor-sektor tertentu saja, pada akhirnya akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan *trickle down effect* (efek menetes ke bawah). Didasarkan pada kerangka pemikiran tersebut, pada awal priode Orde Baru hingga akhir tahun 1970-an, strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintahan Soeharto lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan ekonomi nasional dimulai dari pulau Jawa dengan alasan bahwa semua fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti pelabuhan, jalan raya dan kereta api, telekomunikasi, kompleks industri, gedung-gedung pemerintahan/ administrasi negara, kantor-kantor perbankan dan infrstruktur pendukung lainnya lebih tersedia di Jawa (khususnya Jakarta dan sekitarnya) dibandingkan di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Mereka percaya bahwa nantinya hasil dari pembangunan itu akan

menetes ke sektor-sektor dan wilayah Indonesia lainnya.

Namun, sejarah menunjukkan bahwa setelah 30 tahun lebih sejak Pelita I tahun 1969, ternyata efek menetes tersebut kecil (kalau tidak bisa dikatakan sama sekali tidak ada), atau proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akibat dari strategi tersebut dapat dilihat pada tahun 1980-an hingga krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997, Indonesia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun yang tinggi, tetapi tingkat kesenjangan dalam pembagian Pendapatan Nasional juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak; bahkan meningkat tajam sejak krisis ekonomi. (Tambunan, 2003).

Tidak dapat diingkari bahwa krisis ekonomi yang dialami Indonesia selama priode 1997-1999, salah satu penyebabnya adalah karena kesalahan strategi industrialisasi selama pemerintahan orde baru yang tidak berbasis pada sektor yang mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang sangat besar, yaitu pertanian. Selama krisis terbukti bahwa sektor pertanian masih mampu memiliki laju pertumbuhan yang positif, walaupun dalam persentase yang kecil. Sedangkan sektor industri manufaktur mengalami laju pertumbuhan yang negatif di atas satu digit (Tambunan, 2001).

Berdasarkan hal di atas, dalam rangka pembangunan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera diperlukan pembangunan mulai dari sektor pertanian yang menjadi keunggulan komparatif tersebut, agar strategi industrialisasi dapat berhasil dengan baik. Disamping itu harus dipahami bahwa masalah industrialisasi bukanlah hanya meningkatkan kemampuan bangsa untuk semakin banyak memproduksi barang

dan jasa di dalam negeri atau meningkatkan mutunya, tetapi juga pada saat yang bersamaan, meningkatkan kemampuan menjualnya, baik di dalam maupun di luar negeri. (Mubyarto, 1994).

Pendekatan pengembangan industri di Eropa dapat mencapai kejayaannya pada awal abad ke 20 karena menggunakan pendekatan “*Cluster*” dalam pengembangannya. Pada saat ini di Indonesia telah mengadopsi pendekatan agribisnis sebagai strategi pembangunan pertanian, termasuk peternakan. Agribisnis menekankan keterpaduan berbagai subsistem dalam alur kegiatan produksi pertanian. Namun masih menyisihkan pertanyaan apakah sistem pertanian rakyat yang individualistic dalam skala kecil secara mudah dapat di transformasi ke dalam suatu sistem agribisnis yang memerlukan keterpaduan seperti bekerjanya sebuah sistem mekanik. Dalam sejarahnya di Amerika, Philipina dan juga Indonesia semasa penjajahan sistem agribisnis dijalankan oleh sebuah perusahaan industri pertanian, (Soetrisno. 2002).

Dalam rangka strategi industrialisasi yang dimulai dari sektor pertanian ini, penulis melihat pengembangan agribisnis pedesaan model klaster industri pertanian dengan pola kemitraan merupakan suatu cara yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, masyarakat desa dan bangsa Indonesia pada umumnya. Tulisan ini terkait dengan persoalan Pertanian dan kebijakan pertanian khususnya di Indonesia. Berpijak dari realitas yang ada pada Kebijakan Pembangunan Pedesaan, khususnya sektor pertanian dan dimaksudkan sebagai saran alternatif konsep yang bersifat membangun kerangka kebijakan pertanian.

Pengembangan Agribisnis Pedesaan Model Klaster Industri Pertanian

Agribisnis merupakan suatu kegiatan penyediaan input produksi pertanian, produksi, pemrosesan, perdagangan, pemasaran dan penyediaan jasa di bidang pertanian. Kegiatan ini merupakan satu mata rantai yang saling terhubung (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2005). Sedangkan definisi Agribisnis menurut Davis dan Goldberg (1957) adalah sebagai berikut, "*Agribusiness is the sum total of all operations involved in the manufacture and distribution of farm supplies; production activities on the farm; and storage, processing and distribution of commodities and items made from them*". (Agribisnis merupakan jumlah dari suatu kegiatan yang meliputi manufaktur dan distribusi input sarana produksi pertanian, produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi komoditas dan produk lain yang dibuat dari produk pertanian. Seluruh kegiatan tersebut membentuk satu rangkaian kegiatan yang disebut Mata Rantai Agribisnis).

Menurut Soeharjo dalam Hernanto (1996), pengertian agribisnis mencakup semua kegiatan mulai dari pengadaan sarana produksi pertanian sampai pada tata niaga produk pertanian yang dihasilkan usahatani atau hasil olahannya. Berdasarkan konsep ini agribisnis digambarkan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai sub-sistem, yaitu (a) subsistem pembuatan dan penyaluran sarana produksi pertanian (*farm supplies*), (b) subsistem kegiatan produksi dalam usahatani yang menghasilkan bermacam-macam produk pertanian, dan (c) subsistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyaluran produk pertanian yang

dihasilkan usahatani atau hasil olahannya ke konsumen.

Dalam perkembangannya konsep agribisnis di atas kemudian disempurnakan menjadi suatu konsep yang utuh, yang mengintegrasikan beberapa subsistem dalam satu kesatuan, yaitu: (1) Subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*), yang meliputi kegiatan di luar pertanian (*off-farm*), seperti bioteknologi; industri agrokimia (pupuk, pestisida); alat-alat pertanian; dan pakan ternak. (2) Subsistem usahatani (*on-farm agribusiness*), seperti pembibitan, pembenihan, budidaya perikanan; peternakan; perkebunan; pertanian. (3) Subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*), yang meliputi kegiatan pengolahan hasil produksi sektor agribisnis berupa industri terkait makanan dan industri bukan makanan. (4) Subsistem jasa-jasa penunjang, yang meliputi kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan sektor agribisnis, seperti agrowisata, perdagangan/jasa, transportasi, dan jasa pembiayaan/keuangan.

Kaitan antar satu subsistem dengan subsistem lainnya sangat erat dan penting, sehingga gangguan pada salah satu subsistem dapat menyebabkan keseluruhan sistem itu terganggu. Oleh karena itu, memahami kaitan-kaitan ini dan peranan lembaga-lembaga penunjangnya (seperti bank, koperasi, peraturan pemerintah, angkutan, pasar dan lainnya) merupakan salah satu tujuan penting dalam agribisnis. Demikian pula mengenai pelaku setiap subsistem dan teknologi yang digunakan. (Purwaningsih, 2006).

Selanjutnya keberadaan agribisnis membutuhkan persyaratan sebagai berikut: (1) Keteraturan, (2) keseragaman, (3) kesinambungan dan (4) ketepatan waktu penyediaan bahan

mentah (baku) hingga dikonsumsi oleh konsumen akhir (TimPSP IPB, 1994).

Peranan Agribisnis dalam perekonomian Indonesia sangat penting, dan bahkan derajat kepentingannya diduga akan semakin meningkat, terutama setelah sektor industri pertambangan dan minyak bumi mengalami penurunan produksi yang sangat mengkhawatirkan. Penggerakan sektor agribisnis memerlukan kerjasama berbagai pihak terkait, yakni pemerintah, swasta, petani, maupun perbankan, agar sektor ini mampu memberikan sumbangan terhadap devisa Negara. Kebijakan dalam hal ini peningkatan investasi harus didukung oleh penciptaan iklim investasi Indonesia yang kondusif, termasuk juga dalam birokrasi, akses kredit, serta peninjauan peraturan perpajakan dan tarif pajak untuk sektor agribisnis (Gumbira, E dan Febriyanti, 2005)

Dengan pemahaman konsep agribisnis yang utuh tersebut di atas, kluster industri pertanian dibentuk dan dikelola, agar dapat menata peran masing-masing unsurnya dalam posisi strategis dan terarah. Perkins *et.al* (2001) mengingatkan bahwa tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integratif (*Integrated rural development*) pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar. Kalaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal dalam perekonomian bersangkutan. Pada gilirannya ketimpangan tersebut akan memperparah masalah-masalah kemiskinan, kesenjangan pendapatan serta pengangguran.

Dalam pembentukan kluster industri pertanian, pembentukan dan pembinaan kelompok tani yang memperhatikan kearifan dan potensi

lokal sangat diutamakan. Kelompok tani yang dinamis memiliki fungsi utama antara lain: (1) Sebagai kelas belajar bagi Petani; (2) sebagai unit produksi usahatani; dan (3) sebagai wahana kerjasama antar anggota dan pihak lain. Bagi petani, kelompok tani merupakan wadah melakukan interaksi dan tukar pikiran; bagi pembina, kelompok tani merupakan wadah melakukan kegiatan pembinaan yang efektif melalui terjadinya interaksi dan diskusi antar petani dan penyuluh (Marzuki, 1999) dalam Sri Harijati.

Kelompok tani harus ditata sedemikian rupa sehingga membangun sebuah system. Brinkerhoff *et al* (1990) mengatakan bahwa kelompok sebagai sebuah sistem, harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Input (sumberdaya), yaitu material, uang, manusia, informasi, dan pengetahuan merupakan hal yang didapat dari lingkungannya dan akan memiliki kontribusi pada produksi output.
2. Output, seperti produk, dan pelayanan adalah hasil dari suatu kelompok atau organisasi.
3. Teknologi, metode dan proses dalam transformasi input menjadi output.
4. Lingkungan, yaitu keadaan di sekitar kelompok yang dapat mempengaruhi jalannya kelompok.
5. Keinginan, yaitu strategi, tujuan, rencana dari pengambilan keputusan.
6. Prilaku dan proses, yaitu pola prilaku, hubungan antar kelompok dan individu dalam kelompok.

7. Budaya, yaitu norma, kepercayaan dan nilai dalam kelompok.
8. Struktur, yaitu hubungan antar individu, kelompok dan unit yang lebih besar.

Dengan kelompok tani sebagai sebuah sistem, diperlukan pemimpin yang dinamis dan mampu menjadi pemimpin yang baik. Dalam Dahama & Bhatnagar (1980), disebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan seorang pemimpin. Faktor-faktor itu adalah:

1. Pemenuhan Kebutuhan.
2. Prestise
3. Keanggotaan yang bernilai
4. Kemampuan berhubungan dan bekerjasama.
5. Interaksi yang kuat.
6. Kejelasan tujuan.
7. Kelompok yang kecil.
8. Homogenitas.
9. Kejadian-kejadian di luar.
10. Posisi yang meningkat.
11. Tekanan/serangan dari lingkungan luar.

Demikian juga keterlibatan koperasi sebagai Industri Kecil Menengah (IKM) dalam pengembangan agribisnis di Indonesia terutama koperasi-koperasi yang saat ini tumbuh di pusat-pusat kegiatan pertanian yang tersebar di seluruh daerah pedesaan, akan memicu proses pengkaitan kegiatan agribisnis dari hulu sampai ke hilir yang akan menghasilkan dampak berganda yang sangat meluas seperti peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, memperluas basis kepemilikan faktor produksi, memicu peningkatan nilai tambah, merasionalkan redistribusi nilai tambah yang dihasilkan serta merasionalkan pembagian resiko yang

lebih adil antara pihak-pihak yang terkait dalam proses kegiatan agribisnis. Hal ini sangat dimungkinkan karena adanya prinsip-prinsip yang melekat pada koperasi, seperti transparansi dalam menejemen, kesamaan hak dalam pengambilan keputusan, pembatasan bunga atas modal serta pembagian hasil yang adil berdasarkan atas besarnya sumbangan yang diberikan setiap individu yang terlibat di dalamnya. (Bustanil Arifin, 1993:7).

Tambunan, (2001) menyatakan bahwa berdasarkan pengamatannya faktor-faktor yang membuat klaster industri berkembang pesat adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pemasok bahan baku, alat-alat produksi, mesin dan komponen-komponennya, subkontraktor, produsen barang jadi, sehingga jarak antara penyedia input – subkontraktor – produsen barang jadi dengan pengusaha IKM menjadi dekat.
2. Adanya persaingan ketat dan kerjasama antara sesama IKM (*collective efficiency*).
3. Di dalam klaster terdapat pusat pelayanan terutama oleh pemerintah lokal yang dapat digunakan oleh pengusaha IKM.
4. Ada spesialisasi, *networks of technologically sophisticated, highly flexible manufacturing firm*.

Disamping itu perlu juga upaya alternatif pemilihan strategi dan upaya pengembangan industri pendukung pertanian, meliputi: (1) pengadaan bahan baku dengan harga yang kompetitif dan tersedia tepat waktu secara kontinyu

dengan jumlah cukup serta mutu yang baik, (2) Pengadaan teknologi dan tenaga ahli, (3) Pengadaan kapital (modal), (4) Peraturan Pemerintah yang mendukung, dan (5) Hubungan keterkaitan antar pelaku ekonomi yaitu hubungan usaha yang harmonis antara sektor pertanian dan industri (Irawadi, 1988)

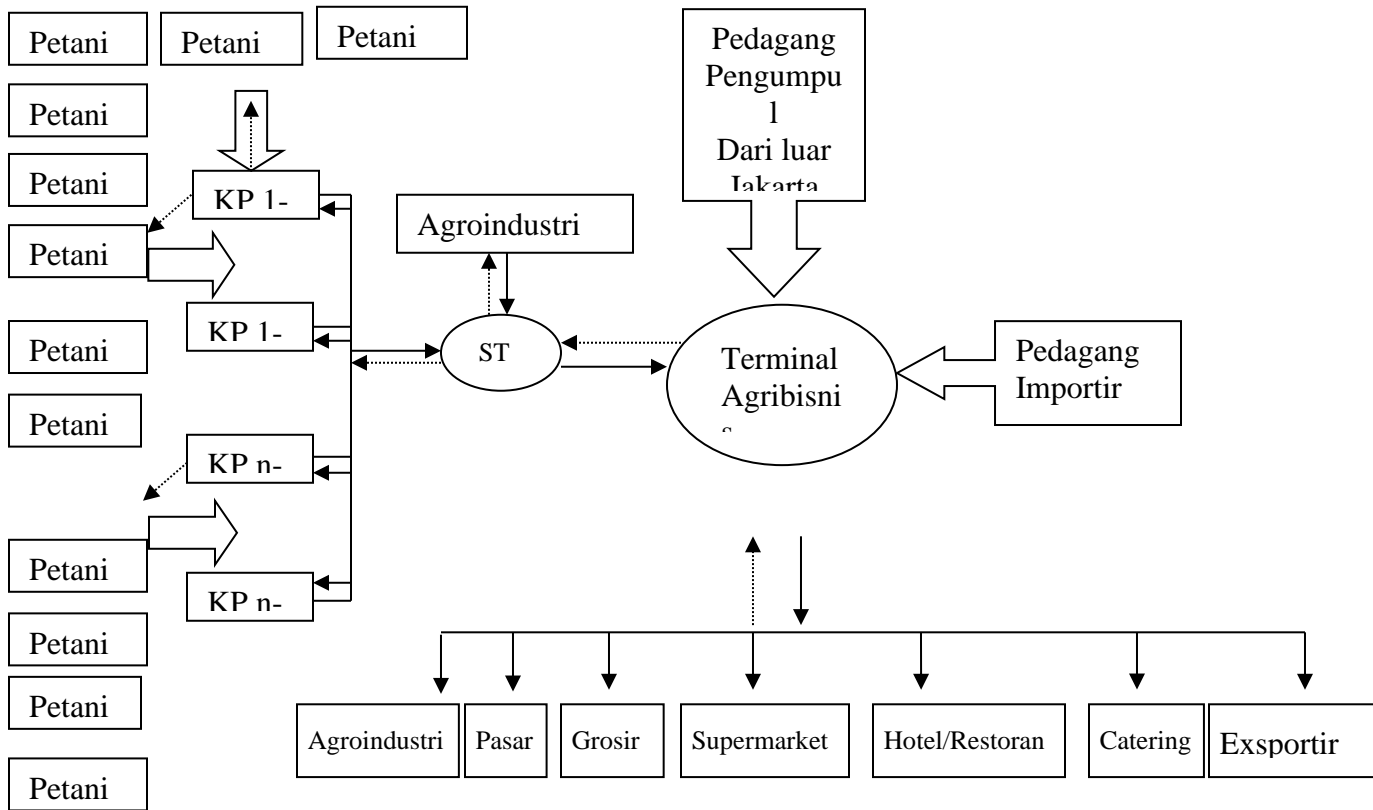
Keberhasilan pembangunan agribisnis model klaster industri pertanian ditandai oleh berjalannya dan semakin meningkatnya peran setiap subsistem dalam agribisnis. Kondisi ini menjamin perkembangan agribisnis yang berkelanjutan berdasarkan prinsip pasar, hal ini terjadi hanya apabila setiap pelaku yang terlibat di dalamnya memperoleh imbalan sesuai dengan pengorbanannya (Memed Gunawan, 1993). Pengembangan agribisnis model klaster industri pertanian ini, sebagaimana kata Perkins, *et al* (2001) harus integral dengan pembangunan daerah.

Selanjutnya dapat dikembangkan dengan pondasi agribisnis tersebut, potret tataniaga pertanian dengan kondisi ideal yang dicita-citakan yaitu suatu kondisi ekonomi yang di dalamnya terdapat suatu sistem yang memberikan jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas penawaran produk dan sarana pertanian serta jasa, baik untuk pasar domestik maupun untuk ekspor, dapat digambarkan dalam skema di bawah ini (lihat gambar 1). Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dicapai dalam waktu yang lama atau dapat pula dipercepat dengan intervensi dari pemerintah melalui konsumen, produsen, lembaga-lembaga pemasar, serta LSM dan media.

Model Sub terminal agribisnis (STA) pada gambar 1 yang telah dirintis oleh departemen pertanian sudah ideal. Dalam implementasinya model STA ini belum sesuai dengan rencana, karena jumlah penawaran kurang cukup secara

ekonomik dan kualitas produk belum homogen. Mengenai berapa besar penawaran yang harus tersedia untuk memasok produk ke satu STA, dapat dijadikan topik penelitian mahasiswa agribisnis. Kemudian penelitian dapat juga dilakukan untuk mengkaji berapa STA untuk memasok satu terminal agribisnis (TA) dengan sasaran pasar domestik tingkat propinsi dan pasar

ekspor. Jika dibandingkan dengan terminal agribisnis buah-buahan, semisal pasar kramatjati, masih terlihat harus diperbaiki dari sisi kualitas, kuantitas dan kontinuitas komoditas yang masuk di TA bila dibandingkan dengan TA Thalad Thai yang ada di Bangkok. (Yayah K. Wagiono. 2009).



Keterangan Gambar :

- : Aliran Komoditas
- .-> : Aliran Informasi & Koordinasi
- KP : Kelompok Tani
- STA : Sub Terminal Agribisnis

Gambar 1 : Distribusi Komoditas dan Aliran Informasi Agribisnis
 Sumber : BAPEDA dan MMA IPB (2002)

Pola Kemitraan Dalam Agribisnis

Konsep agribisnis yang utuh dengan model klaster industri pertanian akan berjalan dengan baik bila mendapat dukungan dana dan bantuan lembaga keuangan berupa perbankan dan lain-lain. Diantara kendala yang sering menjadi batu sandungan adalah ketersediaan modal. Untuk mengatasi persoalan ini dapat dilakukan dengan adanya pola kemitraan dengan pengusaha besar atau kemitraan yang dibuat dengan koperasi.

Kemitraan usaha adalah suatu gejala umum diantara pelaku bisnis. Kemitraan tidak hanya dikembangkan di Indonesia, tetapi diseluruh bangsa-bangsa di dunia. Motivasi utama bekerjakannya kemitraan adalah bisnis murni, dimana setiap pelaku bisnis harus tetap berupaya mencari strategi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing. Selain itu, kemitraan juga sesuai dengan amanat UUD 45 pasal 33 yang mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan, dan kemakmuran masyarakat yang lebih diutamakan. Jadi dalam kaitan ini, kemitraan ini menjadi lebih strategis sifatnya di Indonesia. Kemitraan tidak lagi hanya merupakan strategi aliansi, tetapi juga merupakan strategi untuk menegakkan ketahanan nasional yang ditopang oleh stabilitas ekonomi dan politik yang kokoh (Tjakrawerdaya, 1997)

Menurut Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1997 pasal 1, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan

saling menguntungkan. Kemitraan ditujukan untuk menumbuhkan, meningkatkan kemampuan dan meningkatkan peranan usaha kecil dalam perekonomian nasional, khususnya dalam mewujudkan usaha kecil sebagai usaha yang tangguh dan mandiri, yang mampu menjadi tulang punggung dan mampu memperkokoh struktur perekonomian nasional. Kemitraan usaha dalam bidang pertanian merupakan suatu jurus untuk mewujudkan pertanian modern yang berorientasi pada agribisnis dan agroindustri yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya melalui peningkatan volume dan kualitas usaha dan meningkatkan kualitas sumberdaya terutama pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun dan usaha kecil dalam bidang pertanian.

Kemitraan sub sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dengan pola PIR telah banyak memberikan hasil positif, antara lain berupa peningkatan pendapatan pekebun, menambah lapangan kerja, serta peningkatan produksi perkebunan sebagai penghasil devisa (Lembaga Penelitian IPB, 1997).

Kemitraan yang selama ini dilakukan di Indonesia meliputi berbagai pola, antara lain adalah: (1) Pola Inti – Plasma, (2) Subkontrak, (3) Waralaba, dan (4) Pola dagang biasa. Namun sangat sedikit yang berhasil memperkuat sistem integrasi vertikal komoditas yang diusahakannya. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kegagalan sistem kemitraan yang telah dilakukan selama ini dipaparkan sebagai berikut (Sa'id, 2001):

- 1) kemitraan yang terbentuk antara pengusaha besar dan UKMK (Usaha Kecil Menengah dan Koperasi) tidak

- didasarkan pada prinsip saling membutuhkan,
- 2) Kemitraan yang terbentuk tidak disertai dengan prinsip keadilan distribusi nilai tambah dalam suatu sistem komoditas,
 - 3) Kemitraan yang terbentuk tidak disertai dengan prinsip transfer pengetahuan dan pengalaman, sehingga tidak tercipta suatu sistem pembinaan yang mampu menjamin peningkatan profesionalisme pengusaha kecil yang menjadi mitranya,
 - 4) Kemitraan yang terbentuk tidak disertai dengan prinsip bisnis, tetapi lebih terpaksa kepada memenuhi kewajiban yang digariskan oleh pemerintah,
 - 5) Kemitraan yang terbentuk seringkali hanya sekedar sebatas rencana dan MoU, tetapi implementasinya tidak mampu direalisasikan sesuai dengan harapan,
 - 6) Kemitraan yang terbentuk hanya sekedar jargon politik, jargon prestise pengusaha besar untuk publikasi, sehingga kemitraan yang terbentuk seringkali terbukti hanya sebatas untuk seremonial saja, dan
 - 7) Kemitraan yang terbentuk hanya didasarkan pada paradigma yang sempit yaitu sekedar untuk membagikan bantuan dana kepada UKMK tanpa pertanggungjawaban penggunaannya. Hal ini sangat tidak mendidik masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam

merencanakan dan memperbaiki masa depannya.

Demikian pula, dalam usaha perkebunan kelapa sawit masih ditemui berbagai kendala antara lain belum sinerginya kegiatan hulu-tengah dan hilir. Para pelaku usaha perkebunan yang berada di tengah dan hilir (industri pengolahan dan pemasaran) pada umumnya memiliki potensi menghasilkan nilai tambah dan meraih keuntungan yang lebih tinggi dibanding dengan pelaku hulu (pekebun). Para pekebun baru mendapat menikmati nilai tambah dari kegiatan usahatani dan belum dapat menikmati nilai tambah dari kegiatan industri pengolahan dan pemasaran, disamping itu para pekebun menanggung resiko dan ketidakpastian yang relatif tinggi dibanding dengan pelaku industri pengolahan dan pemasaran. Untuk itu diperlukan kebijakan yang memberikan peluang pembagian nilai tambah yang adil antara hulu-tengah dan hilir agar usaha perkebunan dapat berkelanjutan (Hasbi, 2001). Ada juga kendala dan permasalahan lain yaitu penetapan harga dan sistem pembayaran tandan buah segar (TBS).

Prawirokusumo (1996), juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam pelaksanaan kemitraan usaha di Indonesia yang perlu dicermati, antara lain: a). Perbedaan yang masih besar dalam banyak aspek antara usaha skala besar dengan usaha skala kecil. Usaha skala kecil masih banyak yang tradisional dengan menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. b). Usaha yang bersifat spesialisasi dan standarisasi belum berkembang, sehingga kualitas produksi belum terjamin. c). Unsur-unsur bisnis seperti menjaga kualitas, menepati pesanan, delivery time yang tepat belum

menjadi *way of life* sehingga kerjasama kurang berkembang. d). Usaha besar masih melakukan integrasi vertikal. E). masih adanya jarak antara usaha besar dengan yang lain, sehingga alih teknologi belum berkembang, disamping itu kebiasaan penelitian dan pengembangan dilakukan sendiri oleh usaha besar. F). factor-faktor penunjang belum berkembang, antara lain jaringan informasi, infrastruktur pengembangan bisnis seperti incubator, program inisiasi, transportasi, komunikasi, hasil penelitian dan perpajakan. G). belum memadainya perundang-undangan yang menjadi dasar pembinaan, pengembangan dan eksistensi usaha kecil.

Kemitraan yang selama ini dilakukan di Indonesia meliputi berbagai pola, antara lain adalah: (1) Pola Inti – Plasma, (2) Subkontrak, (3) Waralaba, dan (4) Pola dagang biasa. Namun sangat sedikit yang berhasil memperkuat sistem integrasi vertikal komoditas yang diusahakannya. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kegagalan sistem kemitraan yang telah dilakukan selama ini dipaparkan sebagai berikut (Sa'id, 2001):

- 8) kemitraan yang terbentuk antara pengusaha besar dan UKMK (Usaha Kecil Menengah dan Koperas) tidak didasarkan pada prinsip saling membutuhkan,
- 9) Kemitraan yang terbentuk tidak disertai dengan prinsip keadilan distribusi nilai tambah dalam suatu sistem komoditas,
- 10) Kemitraan yang terbentuk tidak disertai dengan prinsip transfer pengetahuan dan pengalaman, sehingga tidak tercipta suatu sistem pembinaan yang mampu

menjamin peningkatan profesionalisme pengusaha kecil yang menjadi mitranya,

- 11) Kemitraan yang terbentuk tidak disertai dengan prinsip bisnis, tetapi lebih terpaksa kepada memenuhi kewajiban yang digariskan oleh pemerintah,
- 12) Kemitraan yang terbentuk seringkali hanya sekedar sebatas rencana dan MoU, tetapi implementasinya tidak mampu direalisasikan sesuai dengan harapan,
- 13) Kemitraan yang terbentuk hanya sekedar jargon politik, jargon prestise pengusaha besar untuk publikasi, sehingga kemitraan yang terbentuk seringkali terbukti hanya sebatas untuk seremonial saja, dan
- 14) Kemitraan yang terbentuk hanya didasarkan pada paradigma yang sempit yaitu sekedar untuk membagikan bantuan dana kepada UKMK tanpa pertanggungjawaban penggunaannya. Hal ini sangat tidak mendidik masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam merencanakan dan memperbaiki masa depannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberdayakan pekebun / petani hulu, melalui koperasi dapat dikembangkan usaha di bidang agroindustri kelapa sawit dengan sistem kemitraan yaitu kemitraan usaha yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas usaha. Menurut Sabrani (1996) melalui kemitraan usaha dapat ditransfer teknologi dan insentif. Disini

teknologi yang statis diubah menjadi lebih dinamis serta terjalin arus transfer teknologi tepat guna. Selain itu melalui kemitraan pengusaha antar daerah akan terjadi arus kapital dari daerah pengembangan yang maju ke daerah yang lebih rendah.

Pengembangan pola kemitraan usaha antara koperasi dengan mitra usaha (BUMN dan swasta) dapat pula dilakukan melalui kajian terhadap pola kemitraan usaha yang telah ada maupun pola-pola kemitraan usaha yang mungkin diterapkan.

Agar kemitraan yang terbentuk sukses sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan prinsip-prinsip kemitraan, yaitu saling ketergantungan dan saling membutuhkan, saling menguntungkan, memiliki transparansi, memiliki azas formal dan legal, melakukan alih pengetahuan dan pengalaman, melakukan pertukaran informasi, penyelesaian masalah dan pembagian keuntungan yang adil. (Hasbi,2001).

Pengembangan agribisnis dengan model klaster industri pertanian dengan pola kemitraan yang secara konsisten memelihara prinsip-prinsip kemitraan, yaitu saling ketergantungan dan saling membutuhkan, saling menguntungkan, memiliki transparansi, memiliki azas formal dan legal, melakukan alih pengetahuan dan pengalaman, melakukan pertukaran informasi, penyelesaian masalah dan pembagian keuntungan yang adil, dapat menjadi pondasi keberhasilan pembangunan pedesaan khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Penutup

Pengembangan agribisnis terpadu secara utuh dapat digambarkan sebagai sebuah sistem mekanik dimana

keterkaitan antar satu subsistem dengan subsistem lainnya sangat erat dan penting, sehingga gangguan pada salah satu subsistem dapat menyebabkan keseluruhan sistem itu terganggu. Model klaster industri pertanian dengan pola kemitraan dapat menjadi sebuah unit sel dari agribisnis terpadu secara utuh tersebut. Keberadaan dan peranan lembaga-lembaga penunjang (seperti bank, koperasi, peraturan pemerintah, angkutan, pasar dan lainnya) merupakan bagian penting dalam agribisnis. Demikian pula mengenai pelaku setiap subsistem dan teknologi yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, J.G. 1994. *Agroindustrial Investment and Opportunities*. The World Bank, Washington D.C.
- Barlow, C. and C. William. 1989. *Agricultural Processing and Its Economic, Institutional and Social Implications*. Australian Development Studies Network, Canberra.
- Bustanil Arifin, 1993. *Pengembangan Koperasi dalam Menunjang Investasi dan Perdagangan Agroindustri*. Makalah, disampaikan pada seminar Koperasi dan Agroindustri pada tanggal 11 Pebruari 1993. Diselenggarakan oleh "Center for Information Development Studies (CIDES).
- Dahama & Bhatnagar. 1980. *Communication Development*. New Delhi, Bombay, Calcuta,

- India: Oxford & IBH Publishing Co.
- Davis, J.H. and Goldberg, R., 1957, *A Concept of Agribusiness*. Graduate School of Business Administration. Harvard University. Cambridge.
- Goldsmith, A.A & Brinkerhoff, D.W. Editor. 1990. Institutional Sustainability in Agriculture and Rural Development: A Global Perspective. New York: Praeger Publishers.
- Gumbira, E. Dan L. Febriyanti. 2005. Prospek dan Tantang Agribisnis Indonesia, *Economic Review Journal* 200. (On-line). <http://www.bni.co.id>
- Harijati, Sr. 2007. Potensi Pengembangan Kompetensi agribisnis Petani berlahan Sempit: Kasus Petani Sayuran di Kota dan Pinggiran Jakarta dan Bandung. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Hernanto, Fadholi. 1996. *Ilmu Usahatani*. Jakarta: PS. Penebar Swadaya.
- Hasbi. 2001. Rekayasa Sistem Kemitraan Usaha Pola Mini Agroindustri Kelapa Sawit. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Irawadi. 1988. Pengembangan Industri Pendukung Pertanian. Yayasan Pembangunan Pertanian dan Teknologi Indonesia Bogor.
- Mubyarto, 1994. Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, cet ke-3, LP3ES. Jakarta.
- Memed Gunawan. 1993. Kelembagaan Untuk menunjang Pengembangan Agribisnis. Disampaikan dalam seminar Internasional Center for Polycy and Implementation Studies, 24 Desember 1993 di Jakarta.
- Orford Jim (1992), *Community Psychology Theory and Practice*, John Willey & Sons, New York USA.
- Prawirokusumo, Soeharto. 1992. Kajian Konsep Kemitraan dan Keterkaitan. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Purwaningsih, Ninuk. 2006. Adopsi Inovasi Pola Kemitraan Agribisnis Sayuran di Propinsi Jawa Barat. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Perkins, D.H., D.R. Snodgrass, M. Gills, and M. Roemer. 2001. *Economics of Development*. Fifth Edition. W.W. Norton&Company, London.
- Soetrisno, N. 2002. Koperasi Produsen Susu: Model Klaster Industri Peternakan. Makalah disampaikan pada Serasehan Revitalisasi Persusuan di Jawa Timur, diselenggarakan oleh GKSI tanggal 6 Januari 2002.
- Sabrani, M. 1996. Strategi Implementasi Teknologi Dalam Mendorong Pembangunan Sentra Agribisnis. Makalah disajikan pada Seminar dan Lokakarya "Profesionalisme SDM dan Dukungan IPTEK dalam pembangunan Sentra Agribisnis di Jawa Tengah, Solo, 19 Desember 1996.
- Sa'id, E.G. 2001. Kemitraan di Bidang Agribisnis dan Agroindustri. Di dalam: Haeruman, Js. H dan Eriyatno, editor. Kemitraan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan Business Innovation Center of Indonesia.

- Tjakrawedaya, Subijakto, 1997. *Gambaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Abad 21*. Disampaikan pada seminar Nasional Modal Ventura 22 Maret 1997. Jakarta.
- Tim PSP IPB, 1994. *Pengembangan Agribisnis Peternakan Dalam Era Industrialisasi* Pusat Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor.
- Tulus T.H. Tambunan. 2001. *Industrialisasi di negara berkembang kasus Indonesia*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
-
2003. *Perekonomian Indonesia beberapa masalah penting*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Yayah K. Wagiono. 2009. *Potret Tataniaga Pertanian Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang*. Di dalam: Nunung K, Anna F, Dwi R dan Siti J, editor. *Bunga Rampai Agribisnis Seri Pemasaran*. IPB Press. Bogor.
- Hayami, Yujiro dan Masao Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa: Sudut Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan di Asia*. Penerjemah: Zahara D. Noer. Penyunting: Gunawan Wiradi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yusuf dan Widyastutik. 2007. *Analisis Pengaruh Ekspor-Impor Comoditas Pangan Utama dan Liberalisasi Perdagangan terhadap neraca perdagangan Indonesia*. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. 4 No. 1 Maret 2007. *Magister Manajemen Agribisnis* Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Yayasan Agrimedia. 1994. *PIR PERKEBUNAN. Kemitraan Usaha Besar dengan Petani Dalam Agribisnis Perkebunan*. Prosiding Seminal. Yakarta: Direktorat Jendral Perkebunan.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: P.N. Balai Pustaka.
- Redfield, Robert. 1982. *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*. Penerjemah: Ali Hasan. Jakarta: CV. Rajawali.
- Warsidi. 2003. *Sikap Terhadap Pola Kemitraan : Agribisnis Sistem Bagi Hasil dalam Agrimedia (Bulan Maret 2003)* Jakarta: Direktorat Jendral BPPHP Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.